

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam pembangunan, partisipasi masyarakat merupakan isu krusial. Peningkatan jaringan ditujukan untuk meningkatkan kondisi kehidupan masyarakat. Pembangunan masyarakat merupakan upaya untuk mengubah kondisi yang tidak diinginkan menjadi lebih baik. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat merupakan isu penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan. Hal ini sejalan dengan konsep partisipasi yang dikemukakan oleh beberapa ahli di bawah ini. Bornby, dalam Theresia (2014: 196), mendefinisikan partisipasi sebagai tindakan "mengambil bagian", yaitu suatu kegiatan atau pernyataan untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan dengan tujuan memperoleh manfaat. Sementara itu, Arimbi (1993: 1) mendefinisikan partisipasi sebagai umpan balik dan umpan balik informasi. Definisi ini mendefinisikan partisipasi jaringan sebagai proses komunikasi yang berkelanjutan dan terarah, yang berarti bahwa partisipasi masyarakat adalah komunikasi antara pemerintah, sebagai pembuat kebijakan, dan masyarakat, sebagai pihak yang secara langsung terkena dampak kebijakan tersebut.

Partisipasi masyarakat merujuk pada keterlibatan individu dan kelompok dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Dalam konteks pembangunan dan kebijakan publik, partisipasi ini mencakup berbagai bentuk keterlibatan, mulai dari memberi masukan dalam perencanaan

program hingga berpartisipasi secara aktif dalam pelaksanaan proyek. Dengan melibatkan masyarakat, pemerintah dan organisasi lain dapat memastikan bahwa kebijakan yang diambil mencerminkan kebutuhan dan harapan masyarakat, sehingga menciptakan hasil yang lebih efektif dan berkelanjutan. Selain itu, partisipasi masyarakat juga berperan penting dalam pembangunan sosial dan ekonomi. Ketika masyarakat aktif terlibat dalam berbagai kegiatan, seperti program pengembangan komunitas, mereka tidak hanya mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan pendapat, tetapi juga berkontribusi secara nyata dalam perbaikan kondisi hidup mereka. Keterlibatan ini dapat memperkuat rasa kepemilikan, meningkatkan solidaritas antar anggota komunitas, dan memberdayakan individu untuk mengambil peran yang lebih besar dalam menentukan arah pembangunan di lingkungan mereka. Dengan demikian, partisipasi masyarakat menjadi salah satu kunci untuk mencapai pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.

Pemberdayaan masyarakat di Indonesia mengacu pada proses yang memberikan peningkatan kapasitas, pengetahuan, dan keterampilan masyarakat agar dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 (Pasal 2), “Desa menyelenggarakan tata kelola pemerintahan, pembangunan, peningkatan kapasitas masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat yang berlandaskan Pancasila, Piagam Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat berarti pengelolaan dan

pembangunan di desa ditujukan untuk meningkatkan standar hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan, program, dan kegiatan yang selaras dengan hakikat dan tujuan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah proses pengembangan sumber daya manusia atau masyarakat itu sendiri melalui penggalan kemampuan pribadi, kreativitas, kompetensi, serta daya pikir dan gerak untuk meningkatkan kinerja (Laha & Dorohungi, 2021).

Pemberdayaan masyarakat juga diartikan sebagai serangkaian kegiatan untuk memperkuat kelompok rentan dalam masyarakat, termasuk masyarakat yang mengalami kemiskinan. Dan sebagai tujuannya, pemberdayaan merujuk kembali pada keadaan yang didukung oleh pertukaran sosial: masyarakat yang berdaya, memiliki kekuatan atau informasi dan potensi untuk memenuhi kebutuhan fisik, finansial, dan sosialnya, termasuk kepercayaan diri, mengekspresikan aspirasi, memiliki mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan bersikap independen dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya (Suharto, 2005). Oleh karena itu, melalui pemberdayaan, masyarakat mendapatkan manfaat dari sumber daya, peluang, pemahaman, dan kemampuan untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam menentukan masa depan mereka sendiri dan berpartisipasi dalam upaya-upaya yang berpotensi memengaruhi kehidupan di lingkungan mereka (Ife, Jim & Tesoriero, Frank, 2016).

Pemberdayaan masyarakat merupakan strategi dalam konsep pembangunan yang berpusat pada masyarakat sebagai subyek pembangunan. Penelitian terhadap pemberdayaan akan dilakukan di desa Katakeja kabupaten Lembata. Pada

penelitian ini, peneliti akan melihat sejauh mana masyarakat berpartisipasi di program budidaya yang dilakukan pemerintah desa melalui budidaya hortikultura.

Berdasarkan pengamatan terhadap kondisi aktual di Desa Katakeja, dapat disimpulkan bahwa masyarakat setempat masih terjebak dalam situasi keterbelakangan yang cukup kompleks. Rendahnya akses terhadap informasi dan fasilitas penunjang kesejahteraan menjadi faktor dominan yang menghambat proses pembangunan manusia di wilayah tersebut. Ketertinggalan ini tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga pada dimensi sosial dan kultural masyarakat desa yang pada akhirnya memperlebar kesenjangan dengan wilayah yang telah lebih dahulu berkembang. Oleh karena itu, diperlukan intervensi yang terarah dan sistematis dari berbagai pemangku kepentingan guna mengurai permasalahan ini secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Sebagai langkah solutif, peningkatan kualitas sumber daya manusia perlu menjadi prioritas utama melalui penyediaan pendidikan yang layak, pelatihan berbasis keterampilan, serta penguatan kapasitas individu dan kolektif masyarakat. Di samping itu, internalisasi nilai-nilai kemandirian dan pemberdayaan harus ditanamkan secara konsisten agar masyarakat tidak semata-mata menjadi objek pembangunan, melainkan mampu berperan aktif sebagai subjek yang menentukan arah dan strategi pembangunan desanya. Dengan pendekatan tersebut, diharapkan masyarakat Desa Katakeja dapat keluar dari jeratan keterbelakangan dan tumbuh menjadi entitas sosial yang produktif, berdaya saing, dan mandiri dalam menghadapi dinamika kehidupan masa kini dan mendatang.

Berdasarkan salah satu website di media online, Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) di Desa Katakeja tahun 2020 yaitu 0,5000 sedangkan status Indeks Desa Membangun (IDM) masih dikatakan tertinggal. Berdasarkan informasi yang dilansir dalam <https://dashboard.stunting.go.id> bahwa tingkat ketahanan ekonomi masyarakat diperlukan adanya pemberdayaan masyarakat. Maka pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan dan pembangunan harus memiliki komitmen agar masyarakat dapat berdaya guna, memiliki kemampuan, mandiri untuk bisa meningkatkan ekonomi masyarakat dan keluarga melalui pemanfaatan lahan kosong yang ada di desa.

Hortikultura berasal dari bahasa Latin *hortus* yang berarti kebun, dan *cultura* atau *colere* yang berarti budidaya, sehingga secara harfiah dapat diartikan sebagai budidaya tanaman kebun. Seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, istilah hortikultura digunakan dalam pengertian yang lebih luas, tidak terbatas pada budidaya di kebun semata, melainkan mencakup berbagai jenis tanaman yang dibudidayakan secara intensif. Tanaman hortikultura mencakup tanaman pangan, tanaman obat-obatan, serta tanaman hias, dan merupakan salah satu cabang pertanian yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi produk unggulan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan seperti Desa Katakeja.

Di Desa Katakeja, pengembangan tanaman hortikultura telah dilaksanakan, meskipun masih terbatas pada kelompok tanaman pangan. Jenis-jenis tanaman yang dibudidayakan antara lain sayuran seperti bayam, sawi, serta kacang-kacangan, tomat, dan cabai (lombok). Pemanfaatan lahan pertanian untuk budidaya tanaman

hortikultura ini memberikan peluang bagi masyarakat setempat untuk meningkatkan pendapatan dan ketahanan pangan, serta membuka jalan menuju kemandirian ekonomi desa.

Tabel Data 1.1 Data Penanaman Tanaman Holtikultura

Tahun Penanaman	Tanaman Pangan Holtikultura	Partisipasi Kepala Keluarga	Hasil Penanaman
2023	Sayuran, Kacang – kacang, Tomat, Lombok	354	70 %
2024	Sayuran, Kacang – kacang, Tomat, Lombok	20	55 %
2025	—	50	—

Sumber data: Kepala Desa Katakeja Kabupaten Lembata, 2025

Berdasarkan data pada tabel ini dikatakan bahwa penanaman tanaman holtikultura di Desa Katakeja sudah direalisasikan mulai pada tahun 2023 sampai 2025. Masyarakat yang menjalankan dan melaksanakan program ini berdasarkan informasi dari Bapak Tommy Wuwuren selaku Kepala Desa Katakeja berjumlah 50 kepala keluarga, yang mana jumlah ini untuk program penanaman tanaman holtikultura pada lahan kurang lebih 100 hektar tetapi proses pelaksanaan pembukaan lahan dilakukan mulai bulan April dan Mei di tahun 2025 sehingga data pada tahun 2025 masih belum tercatat.

Pemerintah desa memberikan informasi kepada masyarakat untuk diwajibkan melakukan penanaman tanaman holtikultura di setiap rumah pada tahun

2023 sebagai pemenuhan atas pangan masyarakat itu sendiri dan sebagai pembelajaran yang diberikan oleh pemerintah desa untuk melihat potensi serta keaktifan dari masyarakat dalam menjalankan kewajiban tersebut. Masyarakat di Desa Katakeja melaksanakan penanaman tanaman hortikultura di masing-masing rumah, tetapi pada tahun 2024 yang bertahan hanya 20 kepala keluarga saja, sehingga persentase yang diperkirakan di tahun 2023 sebesar 70 % dan 2024 sebesar 55 %. Sedangkan sisa kepala keluarga yang lainnya memilih pergi ke kebun dan tidak menjalankan kewajiban untuk melakukan penanaman tanaman hortikultura di masing-masing rumah.

Kurangnya partisipasi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban yang diberikan oleh pemerintah desa dapat disebabkan oleh berbagai faktor teknis dan praktis. Salah satu alasan utamanya adalah karena perawatan tanaman yang dianggap rumit. Banyak warga merasa kesulitan mengikuti prosedur atau teknik bercocok tanam yang benar, terutama jika tidak memiliki latar belakang di bidang pertanian. Hal ini menyebabkan sebagian masyarakat enggan terlibat secara aktif, karena takut gagal atau justru merusak hasil yang diharapkan. Selain itu, tanaman yang rentan terhadap serangan hama dan penyakit turut menjadi penyebab rendahnya partisipasi. Warga desa cenderung menghindari pekerjaan yang memerlukan perhatian ekstra, terutama jika tidak ada pendampingan atau penyuluhan dari pihak yang lebih ahli. Ancaman kerugian akibat tanaman yang rusak sering kali membuat masyarakat merasa usahanya sia-sia. Akibatnya, mereka memilih untuk tidak melibatkan diri secara langsung dalam program-program pertanian desa.

Masalah lain yang menjadi kendala adalah kebutuhan air yang harus tersedia secara teratur. Tidak semua wilayah desa memiliki sistem irigasi yang baik, sehingga pengairan menjadi tantangan tersendiri. Kegiatan menyiram tanaman secara rutin membutuhkan waktu dan tenaga yang tidak sedikit, terutama bagi masyarakat yang memiliki pekerjaan utama lain. Kurangnya fasilitas pendukung ini membuat kewajiban desa terasa membebani.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Partisipasi Masyarakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Rumah Tangga Melalui Program Penanaman Tanaman Holtikultura Di Desa Katakeja Kecamatan Atadei Kabupaten Lembata”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan pada latar belakang diatas tersebut, maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Partisipasi Masyarakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Rumah Tangga Melalui Program Penanaman Tanaman Holtikultura Di Desa Katakeja Kecamatan Atadei Kabupaten Lembata?
2. Apa saja dampak dari program penanaman tanaman holtikultura terhadap pemberdayaan masyarakat?

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan rumusan masalah yang ada maka, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana partisipasi masyarakat pada program penanaman tanaman hortikultura di Desa Katakeja.
2. Untuk mengetahui dampak dari program penanaman tanaman hortikultura bagi masyarakat.

1.4 Manfaat Penelitian

A. Manfaat Teoritis:

1. Memberikan sumber pengetahuan dan wawasan tentang peran pemerintah desa dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.
2. Memberikan kajian dan memperluas referensi tentang usaha-usaha pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi.

B. Manfaat Praktis:

1. Meningkatkan pemahaman usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam pengembangan ekonomi berbasis pemberdayaan masyarakat dengan pemberian program penanaman hortikultura.
2. Meningkatkan pengetahuan kepada masyarakat secara luas tentang upaya pemberdayaan ekonomi yang dilakukan pemerintah desa di kalangan masyarakat Desa Katakeja.